

Ringkasan **Proyek**



International
Labour
Organization

Better Work Indonesia

Tujuan	Meningkatkan kondisi dan produktivitas di tempat kerja di sektor-sektor padat karya yang menjadi sasaran dengan cara memperbaiki tingkat kepatuhan terhadap standar inti ketenagakerjaan internasional dan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Secara bersamaan, proyek ini juga mempromosikan produktivitas dan daya saing dari berbagai perusahaan yang berada dalam jaringan pasokan global di Indonesia.
Mitra Utama	■ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ■ Kementerian Perdagangan ■ Kementerian Perindustrian ■ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ■ Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ■ Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) ■ Serikat Pekerja ■ Pembeli Internasional
Jangka Waktu	Tahap I (Juli 2010 – Juni 2012, 2 tahun) Tahap II (Juli 2012 – Juni 2015, 3 tahun)
Cakupan Geografis	Industri garmen di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Referensi Program Nasional	Dialog Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Prinsip-prinsip dan Hak-hak di Tempat Kerja: ♦ Penerapan undang-undang tenaga kerja dan seluruh pelaksanaannya yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk melalui penguatan administrasi ketenagakerjaan. ♦ Para pengusaha dan serikat pekerja melalui kerjasama bipartit untuk mencapai hasil-hasil dalam fleksibilitas pasar kerja dan jaminan kerja.
Donor	 Departemen Perburuhan Amerika Serikat  Departemen Perburuhan Amerika Serikat  Pemerintah Belanda  Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO)
Anggaran	USD 1,180,226 untuk implementasi tahap I USD 6,980,000 untuk implementasi tahap II
Kontak	Simon Field Kepala Penasihat Teknis field@ilo.org; field@betterwork.org

Latar Belakang Proyek

Indonesia adalah salah satu negara eksportir terkemuka untuk tekstil dan garmen. Industri ini memberikan kontribusi yang besar untuk ekonomi negara, dengan menyediakan lebih dari satu juta lapangan kerja dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Industri garmen di Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari 8 persen per tahun, saat pabrik-pabrik garmen berpindah dari Cina ke Indonesia dan negara-negara lain di kawasan sekitarnya. Ini mendorong para pemegang merk ternama untuk melakukan pemesanan lebih banyak di pabrik garmen di Indonesia.

Di tingkat perusahaan, keuntungan dari industri yang berkembang sering kali tidak dapat dirasakan oleh para pekerja yang masih menghadapi ketiadaan jaminan kerja dan kontrak jangka pendek. Tidak adanya aturan alihdaya, ketidakpatuhan pada aturan upah minimum, dan kurangnya kerjasama di tempat kerja berdampak pada penurunan kondisi kerja.

Sementara itu, para pembeli/pemegang merk internasionalpun menuntut agar para pemasok mengintegrasikan standar kepatuhan ketenagakerjaan ke dalam berbagai proses produksi, sebagai bagian dari etika bisnis mereka. Untuk itu, para pemegang merk internasional telah melakukan proses audit menyangkut kondisi tempat kerja para pemasok mereka. Akibatnya, para pemasok sering kali diaudit dengan menggunakan berbagai standar perilaku yang berbeda-beda. Pendekatan ini tidak hanya menyebabkan timbulnya biaya tinggi dan inefisiensi tetapi juga menimbulkan kebingungan atau pertentangan dalam menginterpretasikan standar ketenagakerjaan internasional dan peraturan perundangan ketenagakerjaan nasional.

Di antara para pelaku dalam rantai pasokan global, ada konsensus yang kuat bahwa kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan bersifat kritikal terhadap keberhasilan usaha. Namun demikian, proses audit semata-mata tidak dapat membawa perbaikan yang berkesinambungan di tempat kerja. Pihak manajemen dan para pekerja perlu bekerjasama untuk mengatasi persoalan ketidakpatuhan terhadap standar ketenagakerjaan. Ada kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang terpadu yang melibatkan pemerintah di tingkat nasional, organisasi pekerja dan pengusaha di samping juga para pembeli internasional.

Program Better Work

Better Work Indonesia (BWI) adalah suatu program kemitraan antara ILO dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global. Better Work berfokus pada solusi yang terukur dan berkesinambungan, melalui penguatan kerjasama di antara pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, dan para pembeli internasional. Perlindungan terhadap hak-hak para pekerja mampu mendistribusikan keuntungan dari kegiatan perdagangan demi meningkatkan pengembangan manusia, sosial, serta pembangunan ekonomi. Kepatuhan pada berbagai standar ketenagakerjaan dapat membantu berbagai perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif melalui perbaikan akses atas pasar dan pembeli yang potensial.



Program Better Work dibangun berdasarkan pengalaman proyek ILO yaitu Better Factories Cambodia, yang tidak hanya berhasil memperbaiki berbagai kondisi kerja dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, tetapi juga telah meningkatkan daya saing.

BWI menggabungkan penilaian independen terhadap perusahaan dengan layanan pendampingan dan pelatihan untuk mendukung perbaikan nyata melalui kerjasama di tempat kerja. Dengan menggunakan sistem manajemen informasi online yang dirancang khusus, pabrik-pabrik yang bersangkutan dapat berbagi hasil penilaian dan perbaikan kepada para pembeli mereka. Hal ini, memungkinkan para pembeli untuk mengurangi proses audit yang mereka lakukan sendiri dan mengalihkan sumberdaya untuk menangani berbagai permasalahan dan menekankan fokus pada berbagai solusi yang berkesinambungan.

Penerima Manfaat

Para penerima manfaat termasuk di antaranya pemerintah, para pekerja, perusahaan-perusahaan, dan para pembeli dalam rantai pasokan global. Manfaat yang didapat melalui keikutsertaan dalam program BWI, di antaranya adalah:

Perusahaan-perusahaan

Meningkatnya akses ke pasar dengan adanya bukti-bukti kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan yang ditunjukkan kepada para pembeli internasional, reputasi yang meningkat melalui komitmen terhadap proses perbaikan, berkurangnya tingkat keluar masuknya pekerja, dan berkurangnya kebutuhan akan proses audit.

Para pekerja

Perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja, pembayaran upah yang lebih akurat dan meningkatnya kondisi di tempat kerja. Delapan puluh persen pekerja dari industri ini adalah perempuan. Oleh karena itu program ini ditargetkan untuk menangani kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh para perempuan di tempat kerja maupun di luar lingkungan kerja, sebagai contoh pelecehan di tempat kerja. Para pengusaha juga harus memiliki minimal satu persen dari angkatan kerjanya yang terdiri dari penyandang disabilitas, pendekatan untuk mempekerjakan dan mengakomodasikan para disabilitas juga dilakukan oleh program ini. Serikat pekerja/buruh diperkuat agar dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Pemerintah

Pertumbuhan ekspor dengan meningkatnya akses terhadap pasar, reputasi yang lebih kuat sebagai tempat investasi yang aman, dan peningkatan kapasitas administrasi ketenagakerjaan yang lebih baik.

Para Pembeli

Berkurangnya beban dalam pelaksanaan audit dan menguatnya fokus pada perbaikan jangka panjang, interaksi dengan pemerintah di tingkat nasional dan organisasi pekerja dan pengusaha serta kontribusi yang dapat ditunjukkan melalui kondisi kerja yang lebih baik.